

Bimbingan Teknis Siklus Akuntansi Bumdes Maju Jaya Desa Sumber Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Laut

Lisandri¹, Akhmad Yafiz Syam^{2*}, Norbaiti³,

^{1,2,3}, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin

*Email Korespondensi: yafiz@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis siklus akuntansi bagi pengelola BUMDes Maju Jaya dalam menghadapi persoalan tata kelola organisasinya di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan. Sebagai BUMDes yang relatif baru berdiri, pengelola perlu yang memiliki pedoman tertib administrasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban sumberdaya keuangannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dan bimbingan teknis penyusunan formulir dan catatan akuntansi standar. Setelah dilakukan bimbingan teknis ini, peserta menyadari dan memahami bahwa untuk dapat menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan diperlukan tertib administrasi dan manajemen catatan, serta pelaporan keuangan.

Keywords: siklus akuntansi, pedoman administrasi, formulir akuntansi, informasi keuangan

Abstract

The purpose of community service is to provide counseling and technical guidance on the accounting cycle for BUMDes Maju Jaya managers in dealing with organizational governance issues in the field of accounting and financial accountability. As a relatively newly established BUMDes, managers need to have administrative guidelines for managing and being accountable for their financial resources. The method used in this service is Focus Group Discussion (FGD) and technical guidance on the preparation of standard accounting forms and records. After this technical guidance was carried out, participants realized and understood that to be able to provide financial information that is in accordance with the qualitative characteristics of financial reports, it is necessary to have orderly administration and record management, as well as financial reporting.

Keywords: *accounting cycle, administrative guidelines, accounting forms, financial information*

PENDAHULUAN

Program strategis yang sedang digalakkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Gerakan ini selaras dengan gerakan nasional terciptanya 5.000 desa mandiri dengan diberikannya dana desa yang diantaranya akan digunakan untuk mengembangkan permodalan BUMDes. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, setiap desa diharuskan membentuk BUMDes, sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara spesifik keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes (Permendes & PDTT, 2015).

Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, terdapat 86 BUMDes yang sudah terbentuk, namun baru 11 BUMDes yang aktif. Dari sebelas yang aktif tersebut, hanya ada dua BUMDes yang telah signifikan menyumbang Pendapatan Asli Desa yaitu di Desa Bumi Jaya sebesar Rp 16 juta pertahun dan Desa Bukit Mulia sebesar Rp 40-50 juta pertahun (portal.tanahlautkab.go.id.,2020). Hal ini menunjukkan masih banyak BUMDes di Kabupaten Tanah Laut yang perlu dibina dan dikembangkan agar terjadi peningkatan aktifitas sekaligus produktifitas BUMDes sebagai katalisator penggerak perekonomian desa. Di desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 telah berdiri BUMdes dengan nama BUMDes Maju Jaya. BUMdes ini telah aktif sejak awal tahun 2020, dan mulai beroperasi dengan modal Rp. 80.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa. Pada saat ini BUMDes Maju Jaya memanfaatkan sebagian modal tersebut untuk usaha peternakan penggemukan Sapi. Mengingat peran strategis BUMDes Maju Jaya di desa Gunung Makmur, tentu saja harus dikembangkan dan tidak cukup hanya mengandalkan usaha penggemukan sapi yang perputaran modalnya sangat lambat, sementara potensi lainnya masih banyak yang bisa dikembangkan di desa ini, maka diperlukan pengembangan usaha-usaha lainnya yang menguntungkan secara ekonomis (Dewi, 2014).

Dari perspektif manajemen organisasi, salah satu masalah yang dihadapi BUMDes Maju Jaya adalah belum memiliki sistem akuntansi standar yang memastikan tata tertib pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang mendukung pengelola dalam menjalankan tugas memehuhi tata kelola yang baik. Sistem ini meliputi siklus akuntansi serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung perkembangan BUMDes dalam menjalankan roda usahanya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa BAB III pasal 12 ayat 3 bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Permendes & PDTT, 2015). BUMDes harus membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel (Harto, 2018). Pengelola dan stakeholder BUMDes Maju Jaya memerlukan informasi akuntansi yang andal untuk membantu menjalankan berbagai fungsi pengelolaan yang baik dan akuntabel.

Ketersediaan laporan keuangan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan rasional (Hopwood, 2009). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2012). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal diperlukan syarat, yaitu laporan keuangan harus berasal dari siklus akuntansi yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penyuluhan dengan metode FGD dan bimbingan teknis. Peserta adalah pimpinan dan pengurus BUMDes, ditambah dengan Pembina dari pemerintahan desa dan tokoh masyarakat pemerhati perkembangan BUMDes.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, maka luaraan (outcome) yang diharapkan adalah:

- 1) Pengelola mengenal dan memahami tujuan dan pentingnya kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten;
- 2) Pengelola mampu mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam penyelenggaraan pencatatan akuntansi;
- 3) Pengelola termotivasi untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan pendukung lainnya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dan memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan;
- 4) Pengelola memahami pentingnya pencatatan transaksi, penggolongan, dan pengikhtisaran laporan keuangan, serta interpretasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

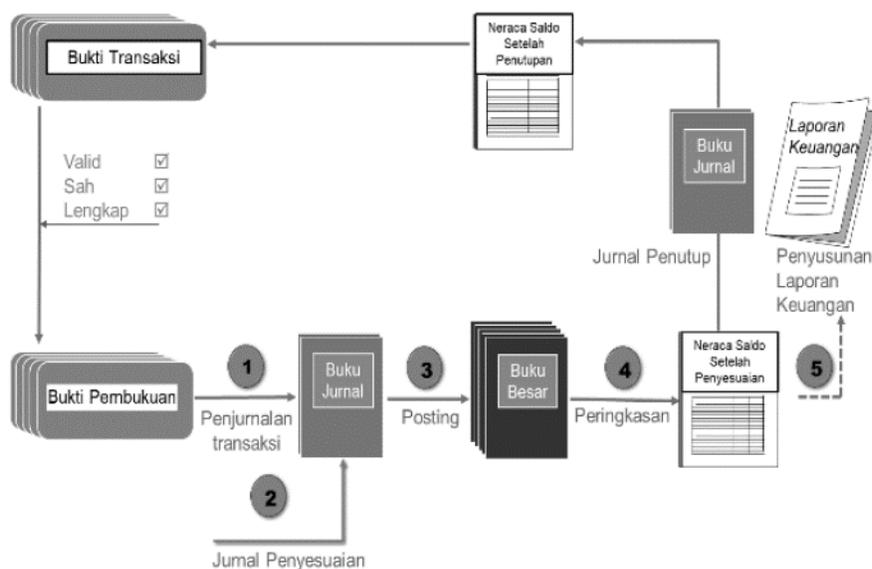
Langkah pertama dalam perancangan akuntansi BUMDEs Maju Jaya adalah melakukan *mapping* analisis dan evaluasi terhadap catatan dan laporan keuangan BUMDes yang sudah ada. Hasil identifikasi ditemukan beberapa kelemahan sistem pencatatan yang telah disusun oleh pengelola. Langkah berikutnya adalah melakukan *mapping* akun laporan keuangan BUMDes dengan Standar Akuntansi ETAP. Berdasarkan *mapping* data dan informasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang selama ini dibuat terdiri dari:

- Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- Daftar Inventaris;
- Daftar Peternak Sapi Mitra Usaha;

Berdasarkan *mapping* tersebut, dapat disimpulkan Pertama, format laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi yang berlaku. Kedua, akun-akun

laporan keuangan dan neraca belum lengkap. Ketiga, nama akun yang tidak seragam dan tidak konsisten antar periode. Keempat, pengukuran masing-masing akun masih menggunakan konsep biaya historis. Kelima, BUMDes belum mengakui penyusutan asset tetap selain tanah. Alasan tidak dilakukannya penyusutan karena pengelola belum memahami konsep penyusutan dan bagaimana menghitung penyusutan.

Lebih lanjut, BUMDes Maju Jaya belum membakukan kebijakan akuntansinya. Kebijakan akuntansi ini sangat penting sebagai pedoman pelaporan keuangan, karena kebijakan akuntansi menjadi dasar dalam melaksanakan akuntansi dan menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Selain itu, kebijakan akuntansi juga sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaksana fungsi akuntansi dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi keuangan BUMDes yang meliputi: (1) Konsep dasar, prinsip dan metode akuntansi, (2) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, (3) Sebagai sumber rujukan (referensi) dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau kegiatan BUMDes agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan akuntansi BUMDes. Kebijakan akuntansi tersebut selanjutnya menjadi pedoman pelaporan keuangan BUMDes Maju Jaya yang diwujudkan dalam mekanisme pelaporan yang terstruktur dan terorganisasi dalam satu siklus akuntansi untuk setiap periode pelaporan. Siklus akuntansi BUMDes tersebut dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Rancangan Siklus Akuntansi BUMDes Maju Jaya

PENUTUP

Bimbingan teknis kepada pengelola BUMDes Maju Jaya ini merupakan kelanjutan dari Bimtek sebelumnya. Sebelum kegiatan ini, telah dilakukan bimtek tata cara membuat rencana bisnis hingga menyusun analisis SWOT. Jadi, pada dasarnya telah dilakukan bimbingan tentang bagaimana pengelolaan BUMDes dengan manajemen modern, namun tetap sederhana dan mudah dilakukan. Untuk menunjang tata kelola yang diharapkan, maka pengelola memerlukan siklus informasi akuntansi keuangan sebagai dasar pengukuran kinerja dan pengambilabn keputusan. Untuk menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, diperlukan pemahaman dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik BUMDEs. Pada kegiatan lanjutan, diperlukan BUMDes bimbingan teknis operasionalisasi pencatatan klerikal akuntansi yang meliputi pencatatan transaksi, penggolongan, pengikhtisaran catatan akuntansi ke dalam laporan keuangan, atau laporan lainnya yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, Volume V No. 1 Februari 2014.
- Harto, P. P. (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 167-188.
- Hopwood, A. G. (2009). Accounting and the environment. *Accounting, Organizations and society*, 34(3-4), 433-439. doi:10.1016/j.aos.2009.03.002
- IAI. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendes, & PDTT. (2015). *Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. No 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.